

## ABSTRAK

Judul Skripsi: Analisis Yuridis Penyelesaian Perkara Pidana Kenakalan Remaja Melalui Diversi

Kenakalan remaja adalah bentuk kejahatan atau kenakalan yang merupakan suatu bentuk perilaku kejahatan sosial disebabkan oleh pengabaian sosial, sehingga dapat menggiring para remaja membentuk sikap menyimpang baik dari norma agama, norma sosial, serta norma hukum. Kenakalan remaja mengacu pada sesuatu yang menyimpang dan tidak diterima dalam sosial masyarakat sampai pelanggaran status sosial yang menyebabkan suatu tindak kriminal. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap kenakalan remaja, (2) Menjelaskan bagaimana pengaturan hukum penyelesaian perkara pidana kenakalan remaja melalui diversi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus serta melakukan pengkajian bahan hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tersier. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban atas tindak pidana kenakalan remaja atau anak yang melanggar hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui peradilan restoratif dan proses diversi. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi penting untuk diterapkan pada anak-anak yang berhadapan dengan hukum agar terwujudnya pemenuhan hak anak sesuai dengan prinsip kepentingan anak supaya hak-hak anak dalam proses peradilan pidana anak di Indonesia tetap terlindungi. Inti dari pengaplikasian konsep diversi yaitu tindakan persuasif yang memberikan kesempatan kepada seseorang dalam memperbaiki kesalahan. Penerapan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak masih diperlukan adanya pengembangan ketentuan yang lebih jelas dan terperinci mengenai diversi, sehingga sangat perlu untuk diperhatikan supaya tidak menyebabkan penafsiran yang terlalu banyak mengenai penerapan keadilan restoratif dan diversi itu sendiri karena pengaturan tersebut berpengaruh terhadap penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

**Kata Kunci:** Remaja, Kenakalan Remaja, Diversi, Tindak Pidana

## ABSTRACT

Thesis Title: Legal Analysis of Juvenile Delinquency Criminal Case Resolution Through Diversion

Juvenile delinquency is a form of crime or misconduct that represents a form of criminal behavior that is socially caused by social neglect, resulting in adolescents developing deviant behaviors from religious norms, social norms, and legal norms. Juvenile delinquency refers to actions that are unacceptable in social life and can lead to violations of social status that culminate in criminal acts. This research aims to (1) Explain the criminal liability for juvenile delinquency, (2) Explain the legal regulations for resolving juvenile delinquency cases through diversion. The method used in this research is a normative legal research method using legislative and case approaches, as well as examining primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The analysis used in this research employs a qualitative analysis method. The results of this study indicate that accountability for juvenile delinquency or children who violate the law is regulated by Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System through restorative justice and diversion processes. Diversion is the transfer of children's case resolution from the criminal justice process to a process outside of the criminal justice system. Diversion is essential for children in conflict with the law to realize the fulfillment of children's rights in accordance with the principle of the best interest of the child, so that children's rights in the juvenile criminal justice process in Indonesia remain protected. The main principle in implementing the diversion concept is the use of persuasive actions or non-penal approaches and providing opportunities for individuals to rectify their mistakes. In its implementation, Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System still requires the development of clearer and more detailed provisions regarding diversion, so it is very necessary to pay attention to it in order to avoid multiple interpretations regarding the application of restorative justice and the diversion itself, as such regulations affect the handling of criminal acts committed by children.

**Keywords:** Juveniles, Juvenile Delinquency, Diversion, Crime